

BAB VI

SARAN

Saran yang dapat diberikan selama menempuh Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Kimia Farma 485, adalah sebagai berikut:

1. Sebelum melaksanakan PKPA, hendaknya calon apoteker membekali diri dengan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan, undang-undang kefarmasian serta manajemen apotek sehingga pada waktu PKP calon apoteker dapat langsung mengaplikasikan ilmu tersebut secara efektif dan efisien.
2. Pemberian KIE kepada pasien perlu ditingkatkan agar pasien mengerti cara penggunaan yang benar dan dapat menambah kepatuhan pasien dalam menggunakan obat.
3. Apoteker sebaiknya lebih memperkenalkan diri sebagai apoteker saat KIE dan tidak hanya menyampaikan cara penggunaan obat tetapi juga menyampaikan efek samping dan terapi non farmakologi yang dapat dijalankan oleh pasien serta menunjukkan tanggal kadaluwarsa dari obat yang didapat oleh pasien.
4. Apotek Kimia Farma 485 disarankan dapat meningkatkan penggunaan Patient Medication Record (PMR) sebagai salah satu wujud pelayanan kepada pasien

DAFTAR PUSTAKA

- Anief, M., Ilmu Meracik Obat, Cetakan 3, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2000.
- Anief, M., Ilmu Meracik Obat, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2005.
- BNF, 2011, British national Formulary, 61 ed. London: BMJ Group.
- Endo, A. N., 2012, *Farmakologi, Obat-obat penting dalam pembelajaran Ilmu Farmasi dan Dunia Kesehatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- ISFI, Kumpulan Peraturan Perundangan Kefarmasian, 2010, Pharmaceutical Press, Surabaya.
- Kabo, P., 2011, *Bagaimana Menggunakan Obat-obat Kardiovaskuler secara Rasional*, Halaman 63-98, Jakarta, Balai Penerbit FKUI.
- Lacy, F. C., Lora, L. A., Morton, P. G. & Leonard, L. L., 2009, Drug Information Handbook 17th ed, American Pharmacists Association, New York.
- McEvoy, Gerald K., *et al.*, 2011, AHFS Drug Information, American Society of Health-System Pharmacist, Bethesda, Maryland.
- Menkes RI, 1980, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 1980 tentang Perubahan dan Tambahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.26 Tahun 1965 tentang Apotek, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menkes RI, 1993, Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 922/ Menkes/ Per/ 1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Ijin Apotek, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

- Menkes RI, 2002, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1332/ Menkes/ SK/ X/ 2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menkes RI, 2004, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1027/ Menkes/ SK/ IX/ 2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menkes RI, 2011, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor No. 889/ MENKES/ PER/ V/ 2011 Tentang Registrasi, Izin Praktek, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, Menteri Kesehatan, Jakarta.
- MIMS Indonesia Petunjuk Konsultasi ed. 12, 2013, PT. Medidata Indonesia, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.51 tahun 2009, tentang Pekerjaan Kefarmasian, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Jakarta.
- Seto, S., & Nita Y., 2012, Manajemen Farmasi. Airlangga University Press, Surabaya..

- Sweetman, S.C., 2009, Martindale: The Complete Drug Reference 36th ed., Pharmaceutical Press, London.
- Sulasmono dan S. H. Yustina, 2007, Apotek: Ulasan Beserta Naskah Peraturan Perundangan Terkait Apotek Edisi **Revisi**, Penerbit Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Tatro, D. S., *et al.*, 2003, A to Z Drug Fact, Fact and Comparisons.